

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahalnya proses pembuatan sertipikat di Indonesia menyebabkan masyarakat enggan mengurus dan mendaftarkan tanahnya kepada pemerintah. Selain itu proses yang panjang dan berbelit-belit juga menjadi salah satu faktor banyaknya tanah di Indonesia belum terdaftar (Darto, 2018). Dengan banyaknya tanah yang tidak terdaftar dan tidak memiliki kepastian hukum sehingga timbul banyak permasalahan di masyarakat, seperti penyerobotan lahan, dualism kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas. Seperti pada kasus villa di Jalan Bukit Berbunga Kota Batu tahun 2016, villa tersebut dibakar akibat adanya konflik antar Ani selaku pemilik tanah dan Adi selaku yang menempati tanah tersebut, ani mengaku tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum neneknya dengan tanda bukti surat perjanjian, sedangkan Adi mengaku tanah tersebut merupakan warisan dari ibunya (Jannah, 2018).

Dari kasus diatas terlihat jelas bahwa pentingnya bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sertipikat hak milik atau SHM merupakan bukti kepemilikan yang sah, mutlak dan tidak dapat disanggah oleh siapapun. Adapun bukti-bukti kepemilikan yang sah lainnya yaitu akta tanah diterbitkan oleh notaris. Pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat peraturan perundang-undangan pertanahan guna memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan dalam bentuk undang-undang pokok agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan UUPA merupakan aturan hukum pertama yang mengatur pertanahan pada masa kemerdekaan. Sebelum adanya undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia pada masa awal berdirinya negara hingga tahun 1960 masih menerapkan undang-undang pertanahan kolonial. Adanya UUPA ini menjadi perubahan mendasar bagi hukum agraria di Indonesia, perubahan tersebut meliputi susunan perangkat hukum, rancangan yang mendasari maupun isinya. Selain itu, menurut (Pendstaren, 2018) kehadiran UUPA juga membuat pembaruan agraria yang dituangkan dalam panca program reformasi agraria nasional yang isinya yaitu: (1) Pembaharuan aturan agraria melalui penggabungan aturan yang bercitra indonesia dan menjamin kepastian hukum; (2) menghapus tanah milik asing; (3) Mengakhiri pengambilan feodal secara terus menerus; (4) Perubahan secara menyeluruh terkait kepemilikan tanah dan peraturannya; (5) Perencanaan penyediaan dan peruntukannya direncanakan sesuai dengan faktor pendukung dan kemampuannya.

Pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan “pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah di seluruh negeri” selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pendaftaran tanah meliputi: (1) objek tanah diukur, objek tanah dipetakan, dan objek tanah dibukukan; (2) melakukan pendaftaran dan peralihan hak tanah; (3) tanah diberikan surat tanah sebagai bukti yang berlaku.

Selanjutnya pemerintah membuat PP (peraturan pemerintah) Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku hingga tahun 1997 atau kurang lebih 35 tahun dan menghasilkan sebanyak 16,3 juta bidang yang telah terdaftar dan tersertifikasi. Selanjutnya pada tahun 1997 pemerintah menerbitkan

peraturan pemerintah baru tentang pendaftaran tanah guna mengikuti arus perkembangan zaman. PP tersebut adalah Peraturan No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berisi tentang bagaimana tata cara pendaftaran tanah yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan menteri agraria Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah tersebut menghasilkan sebanyak 23,7 juta bidang yang terdaftar dan tersertifikasi.

Pada tahun 2016 terdapat 126 juta objek tanah di seluruh Indonesia, 40 juta objek sudah terdaftar dan 86 juta bidang belum terdaftar (Kurniawan, 2017). Menanggapi hal tersebut pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membuat kebijakan PTSL. Kebijakan PTSL merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan sertifikasi objek tanah secara keseluruhan pada tahun 2025. Kebijakan tersebut diawali dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang isinya mengintruksikan 14 lembaga yang terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Milik Usaha, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kepolisian, kejaksaan, Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, LAPAN, Badan Informasi Geospasial, Gubernur dan Walikota.

Pelaksana utama kebijakan PTSL adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertugas untuk: Pertama, menyelenggarakan program tersebut dan mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu tanah yang memenuhi syarat untuk disertifikasi, Kelompok 2 yaitu tanah yang hanya dicatat dalam buku tanah karena tanah tersebut kondisinya masih sengketa kepemilikan, kelompok 3 yaitu tanah didaftarkan saja dikarenakan tanah tidak memenuhi persyaratan.

Kedua, membuat aturan dan mempercepat penyelesaian pendaftaran tanah. Ketiga, membuat peraturan yang mengatur tentang durasi waktu pengumuman data pertanahan agar penyelesaian lebih cepat. Keempat, menyampaikan hasilnya kepada tim PTSI dengan tujuan mempermudah dalam pengelompokan data. Kelima, mengevaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada presiden.

Kementrian ATR/BPN selaku implementator kebijakan ini membuat peraturan sebagai payung hukum dalam kebijakan PTSI yang tertuang dalam PERMEN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Prona melalui pendaftaran tanah sistematis yang kemudian pada tahun yang sama peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Menteri nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan PTSI. Peraturan tersebut diganti karena pada peraturan sebelumnya belum diatur terkait pemanfaatan tenaga professional, serta masih minimnya sumber pembiayaan. Kemudian pada tahun 2017 peraturan tersebut diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Perubahan tersebut akibat pelaksanaan peraturan sebelumnya mengalami berbagai kendala dalam berbagai hal seperti prinsip dan substansi yang belum diatur. Terakhir, kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berlaku hingga saat ini.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan PTSI berlaku terhadap semua tanah di Indonesia dan melalui 13 tahapan. Program PTSI dilakukan oleh tim yang disebut dengan tim adjudikasi PTSI dan didalamnya terdapat 3 satuan tugas yaitu satgas administratif, yuridis, dan fisik yang dibentuk oleh kepala kantor pertanahan masing-masing kota dan diatur dalam keputusan

kepala kantor pertanahan kota/kabupaten, selain itu dalam pelaksanaan program PTSL juga melibatkan pemerintah desa.

Pasal 13 poin 3 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa panitia adjudikasi terdiri dari unsur pegawai negeri sipil, pegawai non PNS dan dibantu oleh perangkat desa, RT, RW dan organisasi masyarakat setempat. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap juga tidak dilakukan secara mandiri melainkan dikumpulkan secara kolektif oleh kelompok masyarakat (POKMAS) yang dibentuk oleh kepala desa guna optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kebijakan ini. Tugas POKMAS di desa/kelurahan yakni membantu mengumpulkan data yuridis maupun data fisik setiap pemohon atau peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang kemudian diberikan kepada satgas yuridis dan satgas fisik untuk disahkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kantor pertanahan melalui tim adjudikasi PTSL menerima berkas jadi yang sudah dikumpulkan oleh pihak desa.

Biaya yang harus dibayarkan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu sebesar 450 untuk kategori termahal dan 150 ribu untuk kategori termurah. kelima kategori tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah di Indonesia yakni kategori 1 untuk provinsi papua, maluku, dan NTT. Kategori 2 untuk provinsi riau, Bangka Belitung, Sulawesi tengah, Sulawesi utara, Sulawesi tenggara dan NTB. Kategori 3 untuk provinsi Gorontalo, Sulawesi barat, aceh, Sumatera barat, dan Kalimantan timur. Kategori 4 untuk provinsi Kalimantan selatan, Bengkulu, lampung, jambi dan sumatera selatan. Kategori 3 untuk provinsi Jakarta, banten, jawa barat, jawa timur, jawa tengah, Yogyakarta, dan bali.

Biaya tersebut digunakan pembuatan dan pemasangan tanda batas, materai, foto kopi berkas, letter C, dan saksi yang dibayarkan kepada pihak pemerintah desa. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pungli yang dilakukan baik oleh pihak desa maupun panitia adjudikasi PTSL (Kusuma, 2019). Seperti yang terjadi di Desa Tobai Timur, Kecamatan Soko Banah Madura peserta PTSL diminta biaya sebesar Rp. 500.000 (Basri, 2019). Kasus serupa juga terjadi di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah dimana biaya pengurusan PTSL mencapai Rp.700.000 (Khairudin, 2019).

Berdasarkan kasus di Madura dan di Solo mengenai pungli oleh pihak desa dalam pelaksanaan kegiatan program PTSL maka perlu adanya penerapan konsep akuntabilitas sehingga tidak terjadi kasus-kasus pungli seperti yang sudah terjadi. Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut baik kepada publik atau masyarakat maupun kepada *stakeholder* dalam hal ini kepada institusi terkait. (Daud Soeharso, 2017).

Kantor Pertanahan Kota Batu dalam melaksanakan program PTSL terbilang sukses dan diminati oleh masyarakat, pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Kota Batu menargetkan sebesar 10.000 bidang tersertifikasi yang terbagi menjadi 3 desa dan 1 kelurahan yakni desa Oro-Oro Ombo sebanyak 3000 bidang, desa Torong Rejo sebanyak 4000 bidang, desa Gunungsari sebanyak 1000 bidang dan kelurahan Dadaprejo sebanyak 2000 bidang (Mastur, 2018). Pelaksanaan program PTSL di Kota Batu juga sudah sesuai dengan penjelasan peraturan menteri yaitu dalam pelaksanaannya melibatkan pihak Pemerintah Desa.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Madura dan di Solo penulis ingin meneliti bagaimana akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari dalam pelaksanaan Program PTSL dalam hal pengumpulan data peserta PTSL. Penulis memilih Desa Gunungsari dengan berbagai pertimbangan seperti luas wilayah desa gunungsari yang lebih luas dari desa-desa lain peserta PTSL namun mendapat jatah paling sedikit dan kemudahan penulis dalam mengakses data pendukung penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan poin latar belakang, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Batu Tahun 2018?
2. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Batu Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan mengenai Akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dalam mewujudkan Akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang pertama pada penelitian ini yakni bagaimana penelitian ini berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dari sisi disiplin ilmu pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sisi lain dalam penelitian ini yaitu berusaha mengaktualisasi teori-teori yang diperoleh dikelas dengan kondisi nyata dilapangan. Penelitian ini juga sebagai ajang bagi peneliti untuk menambah wawasan, selain bagi pembelajaran dikelas peneliti juga akan menganalisis bagaimana kondisi nyata dilapangan, sehingga pada akhirnya wawasan mengenai praktik lapangan didapatkan oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi kritik dan saran bagi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan kinerja, terutama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


```

graph TD
    A([Kepala Desa Gunungsari]) --> B([Pokmas PTSL])
    B --> C([Masyarakat desa gunungsari])
    A --> D[Legitimasi, pemanfaatan sumberdaya]
    D --> E[Membuat SK POKMAS PTSL]
    E --> F[Melibatkan unsur RT,RW, dan tokoh masyarakat]
    B --> G[Transparan]
    G --> H[1. Penyuluhan  
2. penyampain informasi terkait PTSL  
3. pertanggung jawaban]
    B --> I[Efisien dan efektif]
    I --> J[1. Pengumpulan secara terstruktur  
2. pengumpulan data selama 1 bulan]
    B --> K[Responsiv]
    K --> L[1. Menerima aduan masyarakat terkait data yang keliru  
2. cepat dalam mengkoreksi kesalahan  
3. tanggap terhadap masyarakat yang bertanya]
    F --> M[1. Penerbitan sertifikat  
2. tidak terjadi konflik setelah sertifikat diterbitkan  
3. masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat]
    L --> N{Pelaksanaan kebijakan PTSL oleh Pokmas sesuai dengan peraturan yang berlaku}
    M --> N
    N --> C
    N --> O{Tidak}
    O --> C
  
```

The flowchart illustrates the process of implementing the PTSL (Peta Tanah Sertifikat) policy in Gunung Sari Village. It begins with the Village Head (Kepala Desa Gunungsari) initiating the process through the PTSL Community (Pokmas PTSL). The process is guided by four principles: Legitimacy and resource utilization, Transparency, Efficiency and effectiveness, and Responsiveness. The process involves creating a PTSL SK (Decision), involving community elements (RT, RW, and community figures), and conducting a series of steps: 1. Penyuluhan (Education), 2. penyampain informasi terkait PTSL (Information dissemination related to PTSL), 3. pertanggung jawaban (Accountability), 1. Pengumpulan secara terstruktur (Structured collection), 2. pengumpulan data selama 1 bulan (Data collection for 1 month), 1. Menerima aduan masyarakat terkait data yang keliru (Receiving community complaints related to incorrect data), 2. cepat dalam mengkoreksi kesalahan (Quickly correcting mistakes), and 3. tanggap terhadap masyarakat yang bertanya (Responding to community inquiries). The process concludes with the issuance of certificates (1. Penerbitan sertifikat), ensuring no conflicts arise after certificate issuance (2. tidak terjadi konflik setelah sertifikat diterbitkan), and the community having strong evidence of land ownership (3. masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat). The final step is the implementation of the PTSL policy by the PTSL Community in accordance with applicable regulations (Pelaksanaan kebijakan PTSL oleh Pokmas sesuai dengan peraturan yang berlaku). If the implementation is successful, the process ends with the community (Masyarakat desa gunungsari). If not (Tidak), the process loops back to the community.

9

Dari masing-masing indikator yang telah disebutkan diatas maka akan memunculkan sebuah item. Item didapat dari penjelasan indikator. Dari indikator legitimasi memunculkan item pembuatan SK pokmas PTSL. Indikator responsivitas memunculkan 3 item yakni menerima aduan masyarakat terkait kekeliruan data, cepat dalam mengkoreksi kesalahan data, cepat mengirimkan data yang telah dikumpulkan kepada panitia adjudikasi PTSL. Indikator transparansi memunculkan 3 item yaitu penyuluhan kebijakan PTSL, penyampaian informasi terkait syarat pendaftaran program PTSL, dan pertanggungjawaban hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan. Dari indicator pemanfaatan sumber daya memunculkan 1 item yakni melibatkan semua komponen masyarakat desa mulai dari RT, RW, dan tokoh masyarakat. Dari indikator efisiensi dan efektivitas memunculkan 2 item yakni pengumpulan data secara terstruktur dan terjadwal selama satu bulan. Dari keseluruhan item tersebut menghasilkan sebuah keputusan yaitu pelaksanaan kebijakan PTSL oleh kelompok masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan tersebut akan menghasilkan 2 jawaban yakni ya dan tidak. Apabila jawaban ya maka memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain penerbitan sertipikat, tidak terjadi konflik setelah sertipikat diterbitkan, dan masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat. Apabila keputusan tersebut mendapat jawaban tidak maka data yang telah dikumpulkan oleh kelompok masyarakat (POKMAS) Desa Gunungsari akan dikembalikan kepada masyarakat atau pemohon program PTSL untuk diperbaiki lagi.

F. Definisi Konseptual

1. Akuntabilitas

Salah satu variable dari tata kelola pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas. akuntabilitas merupakan keharusan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan pelaporan segala bentuk kegiatannya kepada masyarakat. (Coryanata, 2012).” Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas apa yang telah dikerjakannya. Dimensi akuntabilitas dalam penelitian ini yakni pertanggungjawaban kelompok masyarakat (POKMAS) dalam hal ini merupakan perwakilan dari pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data pemohon program pendaftaran tanah secara efektif dan efisien serta secara transparan dalam pemungutan biaya pendaftaran tanah sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pada tahun 2016 Presiden mendapat laporan bahwa terdapat 126 juta bidang tanah belum terdaftar. Dari jumlah tersebut 46 juta petak tanah yang terselesaikan, sedangkan Badan Pertanahan Nasional hanya mampu menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah setiap tahunnya, berdasarkan hal tersebut Presiden Joko Widodo membuat program khusus yang diprioritaskan mengenai percepatan pendaftaran tanah dalam bentuk kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL yang diharapkan seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan tersertifikasi pada tahun 2025.

program ini merupakan pendaftaran tanah pertama yang dilakukan secara bebarengan pada seluruh bidang tanah di Indonesia dalam cakupan desa atau

kelurahan. Dalam pelaksanaannya dibentuk panitia yang dinamai dengan panitia adjudikasi PTSL yang dibantu oleh pihak pemerintah desa. PTSL terbagi menjadi 9 tahapan yaitu membuat rencana, menetapkan lokasi, mempersiapkan, membentuk panitia adjudikasi, melakukan penyuluhan, mengumpulkan data fisik dan data yuridis, melakukan pembuktian hak melalui data yuridis, mengumumkan data fisik dan data yuridis serta mengesahkannya, dan yang terakhir yaitu menerbitkan sertipikat.

G. Definisi Operasional

1. Akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan POKMAS PTSL
 - b. Responsivitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL
 - c. Transparansi Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL
 - d. Pemanfaatan sumberdaya Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL secara optimal
 - e. Efisiensi dan efektifitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL
2. Permasalahan akuntabilitas kelompok masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
 - a. Rincian Biaya Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Dilapangan
 - b. Keterbatasan Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PTSL

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data yang tujuan dan kegunaannya sebagai alat menganalisa sebuah penelitian.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat cara utama yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara ilmiahnya, bagaimana mengolah datanya, apa tujuan dari penelitian, dan serta kegunaan (Sugiyono, 2016).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata yang tertulis maupun berbentuk lisan dari subjek dan objek penelitian (Lexy J. Moleong, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan jenis penelitian yang deskriptif mengacu pada pendekatan kualitatif karena hasil penelitian berupa data tertulis dalam bentuk informasi yang rinci terkait permasalahan pelaksanaan program PTSL di desa Gunungsari.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang dianggap dapat memberikan informasi factual tentang permasalahan yang telah dipaparkan. Dalam penelitian yang dijadikan sebagai subjek penelitian yakni pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program PTSL. Adapun subjek penelitiannya yakni:

- a. Panitia adjudikasi PTSL
- b. Kepala desa Gunungsari
- c. Sekretaris desa gunungsari

d. Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL

e. 5 orang masyarakat peserta PTSL

4. Sumber Data

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kelompok masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari, maka diperlukan data pendukung yang relevan bersumber dari pihak tertentu, menurut kelompok berdasarkan sumber datanya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi literature, berikut penjelasannya.

a. Sumber Data Primer

Data utama atau data primer diperoleh dari subjek penelitian secara langsung dengan cara wawancara terkait dengan akuntabilitas Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari dalam pelaksanaan program PTSL seperti Kepala Desa Gunungsari, Sekretaris Desa Gunungsari, Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) PTSL Gunungsari dan beberapa masyarakat yang mengikuti program PTSL.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui berbagai macam berita, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan atau sumber data yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti jurnal terkait akuntabilitas pemerintah desa, laporan kegiatan PTSL, berita acara penyuluhan PTSL, dan notulensi penyuluhan PTSL.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara mengumpulkan data merupakan salah satu proses menghimpun data yang dibutuhkan. cara pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung serta menganalisa bagaimana akuntabilitas kelompok masyarakat (POKMAS) PTSL gunungsari melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap guna memperoleh data untuk dianalisa. Observasi meliputi melihat dan mencatat realitas yang ada dilapangan atau dilokasi penelitian (Margono, 2010). Tujuan dari teknik observasi ini yakni untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan program PTSL di lokasi penelitian serta apakah POKMAS melaksanakan program tersebut sesuai dengan konsep akuntabilitas atau tidak.

b. Wawancara

Teknik wawancara yakni pembicaraan antara peneliti dengan subjek penelitian dengan tujuan mencari informasi terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan program PTSL di desa Gunungsari. Wawancara adalah peneliti melakukan percakapan dalam bentuk tanya jawab dengan subjek penelitian. Wawancara bisa terjadi apabila terdapat lawan bicara atau disebut dengan narasumber (Lexy J. Moleong, 2019). Peneliti akan melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa Gunungsari, masyarakat dan *stake holder* lain yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program PTSL.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah merekam atau mengabadikan realitas terkait dengan pelaksanaan program PTSL di Desa Gunungsari. Dokumentasi dapat berupa pengarsipan dokumen, pengambilan gambar, atau pencatatan informasi lainnya yang dianggap penulis relevan dengan penelitian. Penulis akan mendatangi langsung kantor pemerintah desa gunungsari untuk melakukan dokumentasi terkait pelaksanaan program PTSL di desa gunungsari.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data kualitatif yakni menganalisa data dengan pemaparan dan interpretasi secara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman konsep yang digunakan kemudian data digambarkan dalam bentuk uraian kata-kata yang kemudian disimpulkan. Data-data yang diperoleh dikelompokkan sesuai kategori-kategori tertentu kemudian data tersebut direduksi dan dimasukkan dalam variabel-variabel yang telah dirumuskan kemudian dirangkum sedemikian rupa untuk penarikan kesimpulan. Proses menganalisis data terbagi dalam empat tahapan yakni:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, mengamati, dan mengumpulkan data yang didapat melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi sesuai dengan judul tulisan yakni akuntabilitas kelompok masyarakat (POKMAS) PTSL Desa Gunungsari dalam pelaksanaan program PTSL. Data yang didapatkan yakni seperti kwitansi pembayaran peserta PTSL, beberapa dokumen arsip pemohon PTSL, dan dokumen yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk memperjelas pengelompokan data, pengarahannya, serta mengkesampingkan data yang tidak relevan dengan penelitian. Data yang dimaksud adalah data utama dan data pendukung yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna yang jelas dan sesuai dengan penelitian. Tahap awal reduksi data yakni dengan mengorganisir data terkait dengan judul penelitian yang kemudian di komputerisasi dan disimpan dalam sebuah *database* agar mempermudah pencarian saat data tersebut dibutuhkan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses memperlihatkan data dalam bentuk tulisan yang dinarasikan. Miles dan Huberman menyatakan, penyajian data yang selalu digunakan dalam penyajian data naratif (Sugiyono, 2016). Tujuan dari penyajian data adalah mengklasifikasikan data-data yang diperoleh untuk mempermudah pemahaman data tersebut. Data disajikan dalam bentuk tulisan yang sudah di analisis oleh penulis sehingga menjadi satu karya ilmiah.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data melewati 2 tahapan sebelumnya, tahapan terakhir yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami satu persatu hasil penelitian terlebih dahulu yang kemudian dirangkum mana yang menjadi poin penting kemudian diambil kesimpulan.